

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan*

Pembiayaan Terorisme, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta;

Rajagukguk, Erman, *Filsafat Hukum Ekonomi*, Jakarta

Soejono Soekanto, 1985, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan*

Singkat, Rajawali, Jakarta;

_____, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta;

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika,

Jakarta;

Yunus Husein, 2010, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda

Tigalima, Jakarta;

KPK, 2006, Jakarta.

Makalah:

Erna Priliasari, *Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap*

Nasabah Bank, 4 Januari 2010;

Yunus Husein, *Anti Money Laundering* “Suatu Pendekatan Baru Pendekatan Anti

Money Laundering;

_____, *Peranan PPATK Sebagai Financial Intelligence Unit Dalam*

Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang;

_____, *Kegiatan Pemutihan Uang (Money Laundering), “Arthur Andersen Money Laundering Executive Seminar”*, The Regent Hotel, 20 Maret 2001;

_____, *“Upaya Nasional Dalam Menunjang Peran ASEAN Untuk Memerangi Terorisme Melalui Pemberantasan Pencucian Uang dan Penyelundupan Senjata”*, Dirjen Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri, Jakarta, 9 Juli 2002;

Puslitbang Kejaksaan Agung, *Urgensi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*, 28 September 2004, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/ 19 /PBI/2000 tentang Persyaratan Dan

Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia

Bank;

Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor

2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman umum dalam Pelaksanaana dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang bagi Penyedia Jasa

Keuangan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah

menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Internet:

[https://yuniaramalia.wordpress.com/2013/10/30/sanksi-dan-pelanggaran-](https://yuniaramalia.wordpress.com/2013/10/30/sanksi-dan-pelanggaran-rahasiabank/)

[rahasiabank/](https://yuniaramalia.wordpress.com/2013/10/30/sanksi-dan-pelanggaran-rahasiabank/), diakses pada tanggal 7 Nopember 2017

<http://hukumperbankan.blogspot.co.id/2008/12/sejarah-rahasia-bank.html>, diakses

pada tanggal 28 Oktober 2017;

[http://pengadilanmiliterindonesia.blogspot.co.id/2011/10/rahasia-bank-beserta-](http://pengadilanmiliterindonesia.blogspot.co.id/2011/10/rahasia-bank-beserta-implikasinya_26.html)

[implikasinya_26.html](http://pengadilanmiliterindonesia.blogspot.co.id/2011/10/rahasia-bank-beserta-implikasinya_26.html), diakses pada tanggal 7 Nopember 2017

[https://legalbanking.wordpress.com/2014/02/20/perlindungan-hukum-rahasia-](https://legalbanking.wordpress.com/2014/02/20/perlindungan-hukum-rahasia-bank-di-indonesia/)

[bank-di-indonesia/](https://legalbanking.wordpress.com/2014/02/20/perlindungan-hukum-rahasia-bank-di-indonesia/), diakses pada tanggal 28 Oktober 2017;

<https://rizkaandita.wordpress.com/tag/jenis-tindakan-korupsi/>, diakses pada

tanggal 7 Nopember 2017.